

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TANI BERKELANJUTAN BAGI TRANSMIGRAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

**Malta
(malta@ecampus.ut.ac.id)**

PENGANTAR

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sejalan dengan hal tersebut, program transmigrasi merupakan perpindahan penduduk yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik (sejahtera) bagi transmigran dan masyarakat sekitar di kawasan transmigrasi.

Transmigrasi merupakan program lintas daerah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh daerah dalam kerangka pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan transmigrasi selama ini telah memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, namun masih ada beberapa kelemahan atau kekurangan. Selama ini telah banyak upaya pemerintah untuk mengembangkan kawasan transmigrasi, namun kenyataannya banyak kawasan transmigrasi yang dibangun tidak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan sebagaimana diharapkan.

Seiring dengan era otonomi daerah, pelaksanaan program transmigrasi juga memasuki era baru dengan paradigma yang baru. Perjalanan pelaksanaan program transmigrasi meski dengan paradigma baru sekalipun, tidak luput dari munculnya berbagai permasalahan. Konsep model baru dalam pelaksanaan program transmigrasi, yang dijalankan mulai masa reformasi, belum serta merta menjawab persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Terdapat kecenderungan “realitas lapangan” yang berbeda dengan “cita-cita” yang ingin diwujudkan, yaitu kesejahteraan transmigran dan keluarganya, serta terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan.

Meskipun terdapat lokasi-lokasi yang juga dapat dikategorikan telah berhasil; pelaksanaan transmigrasi memiliki banyak tantangan, hambatan, dan ketidakberhasilan yang telah dialami pada berbagai sektor di banyak lokasi permukiman transmigrasi. Menurut Anharudin, Dewi, & Anggraini (2003) dan Helmida (2004), sebagian besar permukiman transmigrasi yang dibangun, belum sepenuhnya mampu mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Berdasarkan data Kementerian yang membidangi Transmigrasi (Anggraini, Widarjanto, Delam, & Diana, 2008; Najiyati, Susilo, Mujianto, 2010), menyebutkan bahwa setelah masa pendampingan selesai, hanya sekitar 30-40 persen lokasi permukiman transmigrasi yang dapat berkembang; selebihnya tidak mampu berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Tarwaka (2008) dan Junaidi (2012) mengutarakan bahwa pada lokasi dan kawasan yang tidak mampu berkembang, menjadikan transmigran gagal memperbaiki standar kehidupan sehingga keluarga transmigran hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan sebagian di antaranya berada di bawah garis subsisten (sangat miskin). Keadaan tersebut mengakibatkan banyak keluarga yang meninggalkan lokasi transmigrasi, dan kawasan tersebut menjadi desa tertinggal. Penyebab utama transmigran gagal memperbaiki standar kehidupan dan hidup di bawah garis kemiskinan adalah kegiatan usaha tani yang dijalankan tidak menghasilkan *output* yang optimal.

Beberapa hasil penelitian (Simanjuntak, 2009; Dewi, 2011; Widarjanto, 2012; Danarti, 2012) menemukan bahwa penyebab kegiatan usaha tani di sebagian besar kawasan transmigrasi kurang berkembang, karena rendahnya: kualitas sumber daya manusia, ketersediaan prasarana dan fisik, akses informasi pertanian, teknologi/inovasi pertanian, sarana produksi pertanian, dan modal usaha tani.

Pengembangan kegiatan usaha tani transmigran yang berkelanjutan sangat perlu diupayakan agar transmigran mampu meningkatkan pendapatan dan mencapai kesejahteraan. Untuk itu diperlukan suatu strategi pengembangan usaha tani transmigran agar kesejahteraan di kawasan transmigrasi dapat terwujud. Tujuan tulisan ini adalah merumuskan strategi

pengembangan usaha tani berkelanjutan bagi transmigran untuk mewujudkan kesejahteraan, berdasarkan kajian pustaka.

KONSEP USAHA TANI BERKELANJUTAN

Keberlanjutan berusaha tani sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang sudah diterapkan di berbagai negara di dunia. Konsep ini berusaha untuk memberikan solusi optimal dari berbagai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh *the World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 dengan laporannya berjudul “*Our Common Future*” (Kay & Alder, 1999). Laporan tersebut mencantumkan definisi pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membatasi peluang generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui pengertian ini, Beller (1990) mengemukakan prinsip “*justice of fairness*” yang bermakna manusia dari berbagai generasi yang berbeda mempunyai tugas dan tanggung jawab satu terhadap yang lainnya seperti layaknya berada di dalam satu generasi.

Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga pilar tujuan yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi (Munasinghe, 1993). Pilar pertama adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi. Pilar kedua adalah pembangunan sosial yang bertujuan pengentasan kemiskinan, pengakuan jati diri, dan pemberdayaan masyarakat. Pilar ketiga adalah pembangunan lingkungan yang berorientasi pada perbaikan lingkungan seperti sanitasi lingkungan, industri yang lebih bersih dan rendah emisi, serta kelestarian sumber daya alam.

Pandangan pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Moffatt dan Hanley (2001), menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan bagian penting yang harus mengintegrasikan komponen-komponen sumber daya, yaitu komponen ekonomi, komponen sosial budaya, dan komponen lingkungan secara serasi dan seimbang.

Pemanfaatan komponen-komponen sumber daya secara serasi dan seimbang dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya pada saat sekarang tanpa mengurangi kesempatan dan pemenuhan kehidupan generasi pada saat mendatang.

Melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian telah dinyatakan dengan tegas tentang pentingnya pembangunan transmigrasi yang berkelanjutan. Dinyatakan bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan di kawasan transmigrasi, pengelolaan sumber daya perlu dilakukan secara arif dan penuh kesadaran dengan menjaga keserasian fungsi lingkungan setempat agar pengembangan usaha dapat berkelanjutan. Memerhatikan amanat UU tersebut, maka seyogyanya seluruh aspek kegiatan pembangunan transmigrasi harus berbasas pada pandangan pembangunan berkelanjutan.

Pada kawasan transmigrasi dengan pola usaha tani, maka konsep pembangunan transmigrasi berkelanjutan harus mengadopsi konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Kuhnén (1992) menyatakan bahwa dalam konsep *sustainability*, pembangunan pertanian harus dapat menjamin kebutuhan petani dan kelangsungan hidup keseluruhan masyarakat di dalam ekosistem yang bersangkutan sepanjang waktu.

Berkaitan dengan konsep *sustainability*, pembangunan pertanian berkelanjutan mempunyai ciri-ciri di antaranya sebagai berikut (Departemen Pertanian, 1992).

- (1) Memberikan kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkan secara lestari; hal ini bermakna untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga tidak merusak keseimbangan ekosistem.
- (3) Menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Nugroho (2002) mengemukakan bahwa sistem pertanian berkelanjutan memiliki ciri-ciri yaitu: (1) sistem usaha tani yang dilakukan pada lahan tersebut harmoni secara ekologi, yang artinya sistem produksi dilakukan dengan tidak menyebabkan kerusakan secara ekologi atau tidak merusak/mengganggu keseimbangan ekosistem, (2) produksi yang dihasilkan cukup tinggi dengan menggunakan teknologi tepat guna, (3) produksi yang dihasilkan memberikan pendapatan dan kesejahteraan secara ekonomi, (4) sistem produksi yang dilakukan dapat diterima dan dilakukan oleh petani dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sesuai dengan perkembangan teknologi, (5) kerusakan akibat sistem produksi yang dilakukan dapat diminimumkan, dan kerusakan tersebut juga dapat diimbangi oleh proses pemulihan sumber daya lahan secara alami, sehingga tingkat produksi yang tinggi, pendapatan, dan kesejahteraan petani dapat dipertahankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa keberlanjutan berusaha berfokus pada pandangan yaitu secara sosial-ekonomi menguntungkan dan secara ekologis layak diterima dan berkelanjutan.

Permukiman transmigrasi Aek Nabirong, Pasaman Barat – Sumatera Barat, dengan kegiatan usaha tani kelapa sawit merupakan satu di antara daerah yang dilaksanakannya program-program pemberdayaan untuk menerapkan kegiatan usaha tani berkelanjutan. Hasil dari program-program tersebut meliputi:terwujudnya kegiatan usaha tani transmigran yang berkembang dalam hal jumlah produksi dan nilai keuntungan yang didapatkan, sehingga tingkat kesejahteraan transmigran mengalami peningkatan. Di samping itu, penerapan usaha tani ramah lingkungan (seperti: penggunaan pupuk organik), telah memberi efek positif bagi kelangsungan kesuburan tanah. Kegiatan usaha tani ini, secara sosial-ekonomi menguntungkan dan secara ekologis layak diterima dan berkelanjutan.

KONSEP TRANSMIGRASI

Transmigrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin: *transmigratus*, yang setelah diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi *transmigration* dari akar kata *migrate* yang berarti berpindah tempat (Ramadhan, Jabbar, & Ahmad,

1993). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2016), transmigrasi berarti perpindahan penduduk dari suatu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Konsep dasar pembangunan transmigrasi adalah suatu upaya mempertemukan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam melalui perpindahan penduduk dan pemanfaatan ruang. Konsep tersebut dirumuskan dalam kebijakan dan strategi yang relevan dengan situasi dan kondisi sepanjang penyelenggaraan transmigrasi (Anggraini et al., 2008).

Transmigrasi diibaratkan sebagai program serbaguna (*multi purpose program*). Transmigrasi diselenggarakan dengan tujuan, yaitu (1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar, (2) mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun sarasannya adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran, membangun kemandirian, dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (UU Nomor 15 tahun 1997).

Penyelenggaraan transmigrasi mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi sebagian masalah nasional diantaranya melanjutkan pembangunan daerah, meningkatkan produksi pangan, perluasan kesempatan kerja, dan peluang usaha bagi golongan ekonomi lemah serta pengentasan kemiskinan. Program transmigrasi diharapkan dapat memberdayakan potensi masyarakat di daerah-daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TANI TRANSMIGRAN YANG BERKELANJUTAN

Pengembangan usaha tani bagi transmigran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Pengembangan kegiatan usaha tani transmigran, dimulai dari proses pembelajaran yang ditujukan untuk mentransformasi perilaku transmigran tersebut agar berpengetahuan tinggi, bersikap positif dan terampil dalam menjalankan usaha taninya, yang selanjutnya menjadikan usahanya berkelanjutan. Berkelanjutan berarti usaha terus berkembang tanpa pengabaian terhadap kelestarian lingkungan hidup, dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat transmigran.

Konsep Input - Proses - Output

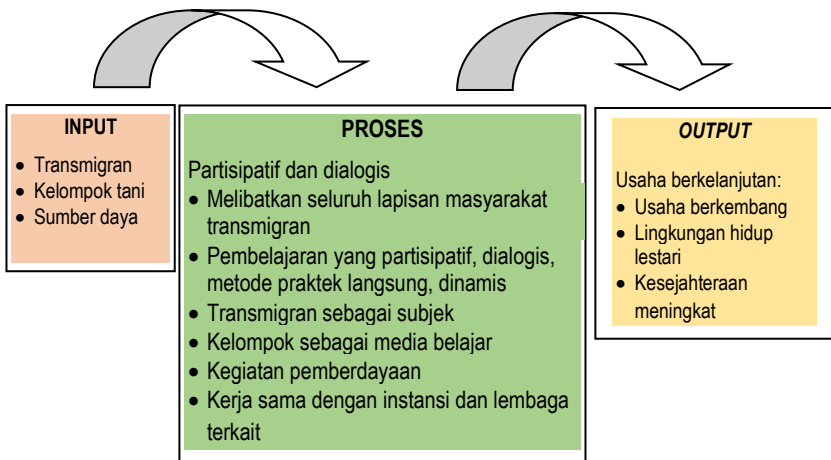
Pengembangan kegiatan usaha tani transmigran dari sudut pendekatan sistem dapat dilakukan dengan mengacu situasi yang ada dalam masyarakat transmigran. Selanjutnya, program dapat diterapkan dari input yang tersedia, seperti: transmigran, tokoh masyarakat, kelompok, lembaga penyuluhan/pemberdayaan, dan lembaga pendukung. Berdasarkan pada input yang ada, dilakukan suatu proses penyuluhan/pemberdayaan yang partisipatif; mengoptimalkan kelompok sebagai media belajar dan mengintensifkan kerja sama dengan pihak terkait, untuk menghasilkan *output* atau luaran sesuai dengan yang diharapkan. *Output* yang diharapkan atas rangkaian proses yang dilakukan adalah usaha yang berkelanjutan, yaitu usaha berkembang tanpa mengabaikan kondisi lingkungan hidup, dan kesejahteraan meningkat (Gambar 1). Berikut penjelasan masing-masing unsur sistem pengembangan kegiatan usaha tani transmigran yang berkelanjutan.

Input Transmigran

Transmigran pada umumnya berasal dari masyarakat “lapisan bawah” yang berpendidikan rendah dan kurang mampu secara ekonomi, dan harus memulai dan menjalani “kehidupan baru” di daerah yang sama sekali baru;

keadaan yang sangat berbeda dengan kondisi daerah asal, kondisi alam serta lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang baru. Hal ini menjadikan transmigran kesulitan dalam menjalani kegiatan usaha tani secara optimal.

Diperlukan perhatian yang lebih tinggi dari semua pihak. Program-program pemberdayaan masyarakat transmigran perlu memerhatikan spesifik lokal, potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat transmigran, agar program yang dijalankan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat transmigran.



Sumber: diadopsi dari Model Donabedian (2003)

Gambar 1. Skema Pengembangan Kegiatan Usaha Tani Transmigran

Input Keberadaan Kelompok Tani

Faktor dari lingkungan sosial yang berperan penting dalam pengembangan kemampuan transmigran dalam berusaha tani adalah keberadaan kelompok. Kelompok tani merupakan suatu kelembagaan yang dapat menjadi wadah bagi para transmigran dalam membangun kekompakan dan kemajuan bersama. Kelompok tani dapat menjadi forum komunikasi yang efektif di tingkat petani. Kelompok menjadi forum belajar yang merupakan

proses pemberdayaan, yang akan berlanjut pada tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha tani transmigran.

Input Akses Sumber Daya

Sumber daya yang berperan penting dalam mengembangkan kegiatan usaha tani transmigran adalah akses input produksi, akses informasi, akses modal usaha, dan akses pasar. Dukungan atas akses input produksi, akses informasi, akses modal usaha, dan akses pasar menjadi faktor penting dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan. Input produksi yang bermutu dan kesuburan lahan menentukan produktivitas dan kualitas hasil. Kemudahan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan serta kemudahan mengakses modal usaha, memengaruhi langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan produksi transmigran ke arah yang lebih baik. Kemudahan akses pasar menjadikan posisi tawar transmigran meningkat.

Proses/Kegiatan Pemberdayaan

Proses/kegiatan pemberdayaan yang dilakukan berbasis pada paradigma pemberdayaan yang menekankan pada aspek partisipatif dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dan komunikasi yang dialogis. Komunikasi yang dialogis dan konvergen mengandung arti bahwa kedudukan antara transmigran dengan pendamping adalah sejajar. Sumber komunikasi tidak harus dari satu pihak, misalnya dari pendamping saja, tetapi kedua belah pihak berperan sebagai komunikator sekaligus sebagai komunikan. Pesan-pesan komunikasi yang disampaikan juga tidak bersifat dogmatis, tetapi dapat didiskusikan bersama.

Peran transmigran dalam kegiatan pemberdayaan yang partisipatif adalah sebagai subjek bukan obyek. Sebagai subyek, kegiatan pemberdayaan berorientasi pada diri transmigran, termasuk dalam hal ini tujuan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, masalah dan potensi transmigran, serta pelibatan transmigran dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Peran pendamping bukan sebagai eksekutor atau yang menentukan keputusan yang dibuat. Pendamping berperan sebagai fasilitator yang membantu transmigran dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri, misalnya dengan memfasilitasi informasi atau data, dan keperluan lain yang dibutuhkan untuk merencanakan usaha. Peran lain adalah sebagai dinamisator atau motivator transmigran, sehingga transmigran memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan berkemauan tinggi untuk lebih maju. Peran pendamping sebagai mediator juga diperlukan dalam pengembangan SDM transmigran, yaitu sebagai penghubung antara transmigran dengan pihak luar untuk menjalin suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Proses pembelajaran yang diselenggarakan dalam kegiatan pemberdayaan yang partisipatif berorientasi pada partisipan (*participant learning center*). Penetapan tujuan, materi, dan metode kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi transmigran. Selain itu, keterlibatan transmigran sebagai partisipan sangat tinggi dalam kegiatan pembelajaran.

Terkait dengan orientasi belajar pada partisipan, sumber pengetahuan tidak harus dari pendamping. Pendamping bukan sebagai guru yang mentransfer pengetahuan ke partisipan sebagai murid. Pengetahuan dapat digali dari partisipan sebagai orang dewasa yang telah memiliki banyak pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman masing-masing partisipan dapat saling dipertukarkan dan didiskusikan bersama.

Proses Belajar melalui Kelompok

Pengembangan SDM transmigran dalam berusaha tani melalui kelompok sangat penting. Kelompok dapat berperan sebagai media pembelajaran yang efektif bagi transmigran. Sesama anggota kelompok dapat saling berinteraksi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta saling membantu sesama transmigran dalam pemenuhan faktor-faktor produksi. Solidaritas anggota dalam kelompok yang tinggi dapat menjadikan kelompok sebagai media untuk meningkatkan posisi tawar, untuk menjembatani kerja sama dalam memperjuangkan berbagai kepentingan

untuk memastikan ketersediaan sarana usaha, akses modal usaha, akses informasi, dan dalam pemasaran hasil; serta mengembangkan kelompok sebagai unit produksi.

Proses Kerja Sama dengan Instansi dan Lembaga Terkait

Kegiatan usaha tani transmigran merupakan salah satu mata rantai dari berbagai mata rantai dalam sistem agribisnis. Agar sistem ini tetap berjalan diperlukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem agribisnis, seperti: lembaga penyedia modal, input produksi, pemasaran, dan informasi. Pada dasarnya posisi antara transmigran dan lembaga-lembaga tersebut sejajar, sehingga jalinan kerja sama yang terbentuk perlu menekankan pada sifat yang saling menguntungkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa proses yang dapat dilakukan sebagai upaya pengembangan usaha tani transmigran yang berkelanjutan, adalah: (1) Penguatan kelompok sebagai wadah/media pembelajaran bagi transmigran dan media untuk menjembatani kerja sama dengan pihak terkait untuk akses sarana usaha, akses modal usaha, akses informasi, dan kemudahan pemasaran hasil panen. (2) Proses/kegiatan pemberdayaan, dengan tenaga pendamping/penyuluh yang berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan advokator. Kegiatan pemberdayaan yang partisipatif dan berorientasi pada transmigran sebagai subjek.

Output (Hasil)

Output yang diharapkan atas proses yang dilakukan (kegiatan pemberdayaan, kerja sama, dan kelompok sebagai media) adalah adanya keberlanjutan usaha, yang dicirikan dari berkembangnya usaha, tingginya daya dukung lingkungan hidup, dan meningkatnya kesejahteraan keluarga maupun masyarakat transmigran. Keberlanjutan pada aspek ekonomi ditandai oleh: kenaikan rata-rata jumlah produksi per tahun; dan kenaikan nilai keuntungan, yaitu selisih antara penerimaan dan biaya. Keberlanjutan ekologi ditandai oleh: kesuburan tanah dapat dipertahankan/diperbaiki dan

terkendalinya hama penyakit. Keberlanjutan sosial ditandai dari meningkatnya kesejahteraan transmigran, yang dicirikan oleh peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kualitas fisik rumah.

Operasionalisasi Strategi

Tujuan pembangunan tersebut dirumuskan melalui strategi pengembangan usaha tani yang berkelanjutan dengan didasarkan pada potensi sumber daya alam, karakteristik sosial ekonomi transmigran, lingkungan sosial, dan kondisi usaha tani yang meliputi kelembagaan: pemberdayaan, inovasi, keuangan, input produksi, informasi, maupun pemasaran. Rumusan strategi, dirinci sebagai berikut.

1. Peningkatan Ketersediaan Sarana Usaha

Bibit menjadi input utama dalam kegiatan usaha tani transmigran. Pada kenyataannya transmigran sering mengalami kesulitan memperoleh input tersebut dengan tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga. Sebagian besar transmigran mendapatkan bibit dengan membeli bibit alam yang bukan bibit unggul. Penggunaan bibit alam berpengaruh pada rendahnya produktivitas hasil panen, penurunan produktivitas hingga di bawah 50 persen; sehingga menjadikan usaha tani transmigran tidak efektif dan efisien.

Perlu dirintis kerja sama dengan lembaga-lembaga formal penghasil bibit unggul. Diperlukan peran dinas terkait (seperti: Dinas Transmigrasi) dan penguatan kelembagaan lokal di tingkat transmigran (seperti: kelompok tani) untuk mewujudkan kerja sama dengan lembaga penyedia bibit unggul, sehingga transmigran punya akses terhadap bibit unggul. Perlu terus diberikan sosialisasi dan penyadaran untuk memotivasi transmigran tentang kepentingan dan manfaat menggunakan bibit unggul dan pengaruhnya terhadap kuantitas, kualitas, serta kelangsungan produksi.

Selain bibit, pupuk dan obat-obatan merupakan unsur penting sebagai input produksi. Tidak semua lokasi transmigrasi tersedia kios sarana

usaha, transmigran kesulitan mendapatkan obat-obatan karena harus pergi ke kota untuk membeli ataupun tersedia di lokasi namun harganya tidak terjangkau. Hal ini berakibat, kebanyakan penyakit tanaman tidak diobati atau dibiarkan saja. Lokasi yang kelompok taninya tidak aktif, maka transmigran tidak dapat mengakses pupuk subsidi sehingga harus membeli pupuk non subsidi, dengan harga yang lebih mahal. Perlu penguatan kelompok tani supaya transmigran mendapat akses pupuk subsidi. Perlu terus dikembangkan kios-kios sarana usaha yang dikelola kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani (gapoktan), sehingga akan memudahkan transmigran untuk mendapatkan obat-obatan tanaman. Diperlukan peran pendamping dan dinas terkait (seperti: Dinas Transmigrasi) dalam penguatan kelompok tani maupun gapoktan serta memfasilitasi transmigran melalui kelompok tani untuk bekerja sama dengan lembaga penyedia input produksi, seperti distributor pupuk dan obat-obatan tanaman guna mendapatkan harga yang lebih rendah.

2. Peningkatan Akses Informasi

Akses informasi transmigran ke peneliti, pendamping/penyuluh, dan media massa di lokasi transmigrasi pada umumnya rendah, dikarenakan rendahnya intensitas interaksi dengan pihak-pihak tersebut dan kurangnya teknologi inovatif yang ditawarkan. Informasi lebih banyak diperoleh dari sesama transmigran, ketua kelompok tani, dan pedagang, namun kurang sesuai dengan kebutuhan dan pemecahan masalah transmigran. Perlu memfasilitasi transmigran melalui kelompok tani untuk bekerja sama dengan lembaga inovasi, seperti BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) di tingkat provinsi dan perguruan tinggi, sebagai sumber inovasi.

Berbagai sumber informasi lain dapat didayagunakan untuk mengembangkan usaha tani transmigran, dengan konsep *Agricultural Knowledge and Information System* (AKIS) atau Sistem Pengetahuan dan Informasi Pertanian. Pada sistem ini dapat dijalin kerja sama sinergis untuk meningkatkan keserasian antara pengetahuan dan lingkungan, dan teknologi yang digunakan dalam usaha tani.

Pengetahuan baru dikembangkan tidak hanya oleh lembaga penelitian, tetapi juga oleh banyak pelaku yang berbeda.

3. Peningkatan Akses Modal Usaha

Akses transmigran ke lembaga keuangan formal, seperti perbankan pada umumnya rendah. Kondisi yang ada, kebutuhan modal usaha dipenuhi dari modal sendiri yang umumnya sangat terbatas jumlahnya, atau meminjam dari tengkulak dengan ikatan berupa hasil produksi harus dijual ke tengkulak tersebut dengan harga yang ditetapkan oleh tengkulak. Pada sisi lain, kelompok tani merupakan wadah yang dapat dioptimalkan dalam pemupukan modal. Optimalisasi proses pemupukan modal, dapat ditingkatkan melalui penyediaan atau penumbuhan kelompok sebagai fasilitas simpan pinjam, termasuk juga optimalisasi pemanfaatan bantuan modal sebagai sumber modal melalui perbaikan sistem pemberian bantuan.

Kelompok tani dapat diharapkan tumbuh dan berkembang sebagai sarana bagi pemupukan modal di daerah transmigrasi. Syaratnya, kelompok harus tumbuh atas kesadaran masyarakat, memperoleh pendampingan yang baik, mempunyai faktor pengikat terutama untuk memperoleh modal, dan masyarakat tidak dibiasakan menerima bantuan cuma-cuma dari pemerintah.

Peran penyuluh/pendamping dan dinas terkait (seperti: Dinas Transmigrasi) sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi transmigran dalam penguatan kelompok. Pengelolaan modal usaha dengan simpan pinjam oleh transmigran memerlukan tindakan pendampingan, sehingga modal tersebut dapat digunakan secara efektif untuk mengembangkan usaha tani.

4. Peningkatan Akses Pasar

Pada umumnya di lokasi transmigrasi, transmigran menjual hasil panen kepada tengkulak yang datang ke lokasi transmigrasi. Secara teknis, transmigran tidak mengalami kendala dalam memasarkan komoditas, karena semua hasil produksi terserap pasar dan transmigran masih

mendapatkan keuntungan. Namun demikian, sebenarnya keuntungan dapat lebih ditingkatkan, dengan cara bersama-sama menjual melalui kelompok. Perlu menumbuhkembangkan koperasi di semua lokasi transmigrasi. Keuntungan (*margin share*) yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh pedagang/tengkulak, maka akan dapat dinikmati oleh anggota koperasi melalui penjualan langsung ke perusahaan, kerja sama dengan prinsip saling meraih manfaat. Penyuluh/pendamping dan dinas terkait dapat berperan dalam memfasilitasi pembentukan koperasi; dalam hal ini dapat bekerja sama dengan dinas pada pemerintah daerah yang membidangi koperasi.

5. Peningkatan Peran Kelompok Tani

Peran kelompok sangat penting sebagai wahana interaktif yang efektif dalam proses pembelajaran dan untuk memperkuat posisi tawar. Peran penyuluh/pendamping dan dinas terkait (seperti: Dinas Transmigrasi) di lokasi transmigran diperlukan dalam mendorong kelompok agar menjadi kelompok yang dinamis, mengoptimalkan kegiatan kelompok agar sesuai dengan kebutuhan transmigran; seperti mengaktifkan kelompok tani dengan berbagai kegiatan pemberdayaan bagi transmigran, dan menghubungkan kelompok dengan para ahli di bidang usaha tani. Perlu penguatan keberadaan kelompok tani sebagai wahana dalam memperjuangkan berbagai kepentingan transmigran dan menjembatani suatu kerja sama transmigran dengan penyedia sarana produksi, pembeli hasil pertanian, lembaga penyedia informasi teknologi, dan dengan lembaga keuangan.

Bagi transmigran yang aksesnya rendah terhadap kelompok, penyuluh/pendamping perlu lebih memotivasi transmigran tersebut agar berminat dan mau mengikuti kegiatan kelompok tani. Upaya ini dapat diawali dengan memberikan informasi kepada transmigran tentang manfaat kelompok tani. Kebutuhan yang dirasakan seseorang akan memengaruhi motivasinya bertindak, dan motivasi tersebut selanjutnya memengaruhi aktivitas yang dilakukan seseorang. Penyuluh/pendamping perlu melibatkan tokoh masyarakat setempat

yang menjadi panutan atau kepercayaan transmigran, untuk memotivasi transmigran supaya aktif dalam kelompok tani.

6. Pengembangan Kegiatan Pemberdayaan

Perlu ditingkatkan keikutsertaan transmigran dalam kegiatan pemberdayaan sebagai proses pembelajaran. Terkait dengan itu, diperlukan adanya upaya pengembangan kegiatan pemberdayaan yang partisipatif, komunikatif, dan dialogis. Paradigma tersebut tercermin dari berbagai bentuk, baik dari peran transmigran dan penyuluh/pendamping, proses pembelajaran, metode pemberdayaan, dan materi dalam kegiatan pemberdayaan (Tabel 1).

Tabel 1. Pengembangan Kegiatan Pemberdayaan

Dimensi	Pengembangan Kegiatan Pemberdayaan
Komunikasi	Dialogis dan konvergen antara transmigran dengan penyuluh/pendamping
Peran Transmigran	Sebagai Subjek
Peran Penyuluh/Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitator, membantu transmigran dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri ▪ Motivator, memotivasi transmigran untuk menumbuhkan kesadaran kritisnya hingga mampu menolong dirinya sendiri ▪ Mediator, penghubung antara transmigran dengan pihak luar, membangun <i>network</i> (jejaring) dengan penyedia input, penyedia modal, pasar, dan lembaga inovasi ▪ Advokator, berperan sebagai konsultan untuk menangani masalah transmigran
Proses Pembelajaran	Berorientasi pada subjek (transmigran)
Substansi Pengetahuan	Penggalian pengetahuan dan pengalaman transmigran dipadukan dengan hasil temuan ilmiah dari peneliti
Metode Penyuluhan/ Pemberdayaan	Menekankan pada <i>sharing</i> dan <i>learning by doing</i> , seperti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Demonstrasi (cara dan hasil)

Dimensi	Pengembangan Kegiatan Pemberdayaan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi kelompok ▪ Simulasi ▪ Pelatihan ▪ Anjangsana ▪ Wisata
Materi Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknis produksi (pengelolaan tanah, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian hama penyakit, dan panen) ▪ Manajerial (pengelolaan keuangan, tenaga kerja, pemasaran, komunikasi, kemitraan/kerjasama, dan kelompok)

Penerapan Strategi

Contoh kasus: lokasi permukiman transmigrasi Aek Nabirong, Pasaman Barat–Sumatera Barat (Widarjanto & Nurmawati, 2015). Dinas Transmigrasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak (seperti: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Dinas Pertanian), melaksanakan program-program: pengembangan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan), pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), pembentukan klinik agribisnis, kegiatan pendampingan, dan revitalisasi koperasi.

Gapoktan merupakan gabungan kelompok tani yang dibentuk agar kelompok tani lebih kuat dan mandiri dalam penyediaan sarana produksi, modal, perluasan usaha, pemasaran dan melakukan kerjasama. Gapoktan di Aek Nabirong terdiri atas 7 kelompok tani. Pengembangan kelompok tani/Gapoktan, berefek pada peningkatan jumlah kelompok tani dan keaktifan dalam mewedahi transmigran berusaha tani, serta terbentuknya klinik agribisnis sebagai sarana berkumpul kelompok tani atau Gapoktan dalam membahas berbagai persoalan pengembangan inovasi teknologi dan sosial. Selain itu juga terjadi revitalisasi kelompok tani yang sebelumnya tidak aktif menjadi lebih aktif dalam memfasilitasi transmigran berusaha tani. Dengan Gapoktan yang kuat, mempermudah dalam pemecahan masalah pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pemasaran, dan

mencari investor. Gapoktan mendirikan kios-kios yang menjual sarana produksi yang dibutuhkan oleh transmigran untuk kegiatan usaha tani.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dibentuk dengan tujuan memfasilitasi petani dalam penyediaan permodalan untuk sarana produksi pertanian. LKMA dibentuk sebagai sarana pemupukan modal, karena sebelumnya transmigran terkendala dengan permodalan terutama dalam penyediaan sarana produksi pertanian. Pembentukan LKMA digunakan untuk memfasilitasi petani dalam penyediaan permodalan berupa simpan pinjam untuk kemudahan pengadaan sarana produksi pertanian. Sebagai embrio permodalan, LKMA memperoleh suntikan modal dari Dinas Transmigrasi pada tahap pertama sebesar Rp. 6 juta, tahap kedua sebesar Rp. 5 juta dan tahap ketiga sebesar Rp. 7,5 juta. Penguatan sumber daya manusia LKMA dilakukan dengan pelatihan anggota LKMA dan melakukan studi banding.

Klinik agribisnis dibentuk untuk meningkatkan pelayanan informasi teknologi pertanian, pemasaran dan permodalan. Difusi informasi berjalan simultan kepada anggota kelompok tani melalui komunikasi yang efektif dalam sistem sosial petani. Klinik agribisnis memanfaatkan bangunan rumah guru sebagai ruang perpustakaan dan ruang pertemuan. Untuk mendampingi warga dalam berusaha tani, dikelompokkan kegiatan pendampingan dengan melakukan penempatan petugas Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Petugas tersebut memberikan pelayanan dan informasi di klinik agribisnis. Pendamping ditempatkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan serta percontohan kepada transmigran dalam pengembangan inovasi teknologi, kelembagaan dan sosial. Tenaga pendamping yang diperbantukan termasuk yang berasal dari BPTP Sumatera Barat sebanyak dua orang yang bertugas secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Melalui klinik agribisnis, juga dilakukan sosialisasi inovasi bibit unggul yang didatangkan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. Dilakukan pelatihan teknik pembibitan dan percontohan pembibitan secara berkelompok, sehingga petani mengetahui cara pembibitan kelapa sawit unggul. Kepada transmigran juga disosialisasikan penggunaan bahan

organik seperti pupuk kandang yang bermanfaat untuk memperbaiki kesuburan lahan.

Revitalisasi koperasi dilakukan pendampingan terhadap Koperasi “Lapu Jaya”, yang berada di Aek Nabirong, Pasaman Barat – Sumatera Barat. Koperasi ini direvitalisasi dengan membentuk perangkat baru. Dengan modal yang tersisa sebesar Rp. 5.950.000 dan ditambah bantuan modal dalam rangka pembentukan dan penguatan lembaga ekonomi dan permodalan dari Dinas Transmigrasi sebesar Rp. 15 juta, koperasi sudah berjalan dengan usaha awal penyediaan kebutuhan sehari-hari, serta menampung dan memasarkan hasil panen transmigran. Koperasi melakukan kerja sama dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit untuk memasarkan hasil panen transmigran, dengan harga yang lebih baik jika dibandingkan dengan harga penjualan jika transmigran menjual melalui tengkulak.

Dampak program-program yang dijalankan, terindikasi dari kegiatan usaha tani transmigran yang cenderung berkembang dalam hal jumlah produksi dan nilai keuntungan. Terjadi peningkatan produksi/panen sebesar 44,3%. Adanya kenaikan produksi, secara langsung dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Ditambah lagi, penggunaan bibit unggul, memengaruhi mutu produk yang dihasilkan, sehingga dapat diperoleh harga jual yang optimal. Kondisi ini berefek pada peningkatan kesejahteraan transmigran dari kondisi sebelumnya, yaitu meningkatnya pendapatan transmigran sehingga memudahkan untuk mengakses layanan kesehatan serta perbaikan fisik dan fasilitas rumah menjadi lebih baik. Di samping itu, penggunaan bahan organik (seperti pupuk kandang) oleh transmigran dalam kegiatan usaha tani kelapa sawit, sebagai cara untuk menjaga kelangsungan tingkat kesuburan lahan, sehingga usaha tani berkelanjutan. Dampak usaha tani berkelanjutan, yang berefek pada peningkatan kesejahteraan transmigran/petani sangat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan transmigrasi.

PENUTUP

Pengembangan kegiatan usaha tani transmigran yang berkelanjutan adalah sasaran yang seharusnya menjadi tujuan program kawasan transmigrasi berbasis lahan/tanah. Melalui strategi pengembangan usaha tani yang berkelanjutan, menjadi kekuatan transmigran untuk sekaligus mewujudkan usaha tani yang berdaya saing melalui kerja sama yang kreatif serta punya inisiatif dengan inovasi-inovasi baru. Selanjutnya, kegiatan usaha tani yang berkelanjutan tersebut akan dapat membawa transmigran ke arah peningkatan produktivitas dan pendapatan, sehingga terwujud kesejahteraan. Meningkatnya tingkat kesejahteraan, dengan sendirinya mengentaskan kemiskinan di kawasan transmigrasi. Upaya untuk menghapuskan kemiskinan merupakan satu di antara tujuan SDGs.

REFERENSI

- Anggraini, Widarjanto, Delam, J., & Diana, E. (2008). *Permasalahan dan alternatif solusi penyelenggaraan transmigrasi*. Jakarta: Bangkit Daya Insana.
- Anharudin, Dewi, R.N., & Anggraini, R. (2003). Membidik arah kebijakan transmigrasi pasca reformasi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian*. 1(1),1-14.
- Balai Pustaka. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Beller, W. (1990). How to sustain a small island. In Beller W, d' Ayala P, Hein P (Ed). *Sustainable development and environmental management of small island*. Paris: The Parthenon Publishing Group.
- Danarti. (2012). Analisis potensi dan kebutuhan pengembangan kewirausahaan di pusat KTM Telang. *Jurnal Ketransmigrasian*. 28(1), 46-56.
- Departemen Pertanian. (1992). Kebijakan perlindungan tanaman dalam era pembangunan jangka panjang tahap II. *Seminar Nasional dan Forum Komunikasi VI tentang Penerapan PHT*; 1992 Sept 1; Bandung, Indonesia
- Dewi, R.N. (2011). Kajian karakteristik calon transmigran di Kabupaten Boyolali untuk penempatan transmigrasi. *Jurnal Ketransmigrasian*. 28(2), 103-112.
- Donabedian, A. (2003). *An introduction to quality assurance in health care*. New York: Oxford University Press.
- Helmida, B.E. (2004). Peranan program transmigrasi dalam meningkatkan pendapatan transmigran serta dampaknya terhadap pembangunan daerah sekitarnya. *Jurnal Valid*. 1(1), 65-77.

- Junaidi. (2012). *Perkembangan desa-desa eks transmigrasi dan interaksi dengan wilayah sekitarnya serta kebijakan ke depan* (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kay, R & Alder, J. (1999). *Coastal planning and management*. New York: Routledge.
- Kuhnen, F. (1992). Sustainability, regional development, and marginal locations. *Applied Geography and Development*, 39.
- Munasinghe, M. (1993). *Environmental economics and sustainable development*. Washington DC: The World Bank.
- Moffatt, I & Hanley, N. (2001). Modelling sustainable development: systems dynamic and input–output approaches. *Journal Environmental Modelling and Software*, 16, 545–557.
- Najiyati, S., Susilo, N.R.T., & Mujiyanto. (2010). *Membangun kemandirian transmigran*. Jakarta: Leuser Cita Pustaka.
- Nugroho, P.S. (2002). Peluang dan tantangan pengembangan lahan kering untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. *Alami: Jurnal Air, Lahan, Lingkungan dan Mitigasi Bencana*, 7 (1), 2–13.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ramadhan, K.H., Jabbar, H., & Ahmad, R. (1993). *Transmigrasi: harapan dan tantangan*. Jakarta: Karya Jaya Bhakti.
- Simanjuntak, P. (2009). Identifikasi kemampuan SDM transmigran di Desa Simpang Bolon Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Publik*. Diakses melalui <http://akademik.nommensen-id.org> pada 03 November 2014.

Tarwaka. (2008). *Transmigrasi dan pengangguran*. Diakses melalui <http://www.safelindo.com/2008/11/transmigrasi-dan-pengangguran.html> pada 30 November 2013.

Widarjanto. (2012). Analisis keragaan jenis usaha dan kelembagaan ekonomi di pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM). *Jurnal Ketransmigrasian*, 29(2), 96-108.

Widarjanto & Nurmawati, I. (2015). Tingkat kemandirian transmigran. *Jurnal Ketransmigrasian*, 32(1), 45-55.